

Gerakan #BanggaBuatanIndonesia Perkuat UMKM Bangsa



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

No. HM.4.6/56/SET.M.EKON.2.3/05/2020

Gerakan #BanggaBuatanIndonesia Perkuat UMKM Bangsa

Jakarta, 14 Mei 2020

Perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce* kini kian populer dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19, karena dapat membuka pasar baru dan tidak memerlukan kehadiran fisik.

Maka itu, pemerintah bersama para pelaku digital bergotong-royong memberi dukungan konkret bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) *online* untuk menampilkan produknya melalui Gerakan #BanggaBuatanIndonesia.

"Gerakan ini bukan hanya acara sesaat saja, tapi akan menjadi gerakan berkelanjutan dan didukung oleh berbagai program penguatan UMKM sebagai pilar perekonomian nasional. Dan, ini akan jadi momentum kebangkitan produk-produk Indonesia," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers Peluncuran Gerakan #BanggaBuatanIndonesia di Jakarta, Kamis (14/5), yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Menko Airlangga mencontohkan, "Permasalahan produk pertanian yang menumpuk tidak terjual di pasar, sedikit banyak telah diatasi melalui pemanfaatan *e-commerce*. Peluang yang sama juga harus dimanfaatkan oleh UMKM," ujarnya.

Saat ini diperkirakan baru ada 8 juta UMKM, dari total 60 juta, yang tergabung dalam platform *e-commerce*. Padahal menurut hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2019), jumlah penduduk Indonesia yang sudah mengakses internet mencapai 171 juta tahun lalu. Potensi *e-commerce* Indonesia sendiri diprediksi mencapai US\$82 miliar di 2025 (Google, Temasek, Bain & Co, 2019).

Di sini, pemerintah menyadari bahwa tidak semua UMKM sudah mengenal teknologi digital atau *e-commerce*. "Oleh karena itu, kami menyiapkan pelatihan bagi UMKM agar dapat menjalankan bisnis secara *online*. Berbagai konten pendidikan akan disediakan dan dapat diakses secara gratis," ujar Menko Airlangga.

Menko Perekonomian juga mengingatkan bahwa program pelatihan UMKM *online* ini bukanlah "obat manjur" yang seketika akan mampu meningkatkan penjualan. Tetapi, para pengusaha UMKM tetap perlu tekun dan konsisten dalam menjalankan usahanya. "Pelajari, coba terapkan, belajar dari komunitas, dan komunikasi dengan platform harus terus dilakukan sebagai proses pembelajaran," imbuhnya.

Dalam satu-dua tahun ke depan, interaksi sosial diprediksi tidak akan banyak berubah dari saat ini, yaitu dengan menjaga jarak fisik. Sehingga, kegiatan perekonomian akan banyak dilakukan secara *less physical contact* sebagai bagian dari *the new normal*. Oleh karena itu, pelatihan *online* bagi UMKM bukan hanya untuk menjawab permasalahan saat ini, tetapi juga menjadi persiapan masa depan.

Langkah Pemulihan Ekonomi Nasional Lindungi Usaha Sektor Riil dan Sektor Keuangan

Pandemi Covid-19 yang diawali dengan krisis kesehatan memang telah merambah dan mempengaruhi aktivitas sosial-ekonomi, bahkan menekan sektor riil akibat terganggunya sisi permintaan dan penawaran. Tak hanya di dalam negeri, kondisi ini terjadi secara global yang menyebabkan terhambatnya proses ekspor dan impor.

Untuk mengurangi dampak pandemi, banyak negara sudah mengeluarkan paket kebijakan, termasuk Pemerintah Indonesia yang telah mengambil berbagai langkah mitigasi dalam bentuk finansial dan non-finansial, baik untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan sektor riil.

Pemerintah juga sudah menyiapkan langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah antara lain akan memberikan subsidi bunga kepada debitur perbankan yang memenuhi empat persyaratan, yaitu: (a) merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau koperasi dengan plafon kredit hingga Rp10 miliar; (b) tidak termasuk Daftar Hitam Nasional; (c) memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2); dan (d) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP. Selain UMKM, subsidi bunga juga diberikan kepada perusahaan pembiayaan dan lembaga penyalur program kredit pemerintah yang memenuhi persyaratan.

Memang, salah satu kelompok yang paling terdampak pandemi ini adalah UMKM. Isu yang mereka hadapi sangat kompleks, mulai dari tidak lancarnya *cash flow*, terbatasnya akses bahan baku, berkurangnya permintaan, sampai kepada isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini tak memungkinkan UMKM menjadi penyangga perekonomian nasional seperti saat krisis keuangan dan ekonomi di tahun 1998 dan 2008 lalu.

Di sisi lain, pandemi ini memaksa banyak negara melakukan pembatasan sosial masyarakat. Misalkan Indonesia yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu menciptakan peluang baru yang memungkinkan berbagai aktivitas, seperti proses belajar-mengajar, bekerja dan beribadah, dilakukan secara jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi digital.

Hadir dalam acara peluncuran tersebut antara lain adalah Presiden Joko Widodo; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki; Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate; Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Perdagangan Agus Suparmanto; Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo; Kepala LKPP Roni Dwi Susanto; Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung; serta perwakilan pengusaha UMKM. (rep/iqb)

**Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati**

Website: www.ekon.go.id

Twitter & Instagram: @perekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id